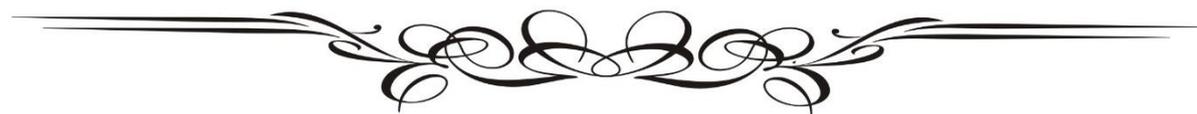


KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 18 Oktober 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman, 2)	Kamis, 18 Oktober 2018	Pembangunan Huntara Terhambat Data	Pembangunan hunian sementara bagi penyintas gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah masih terkendala pemutakhiran data rumah rusak.
2	Kompas (Halaman, 21)	Kamis, 18 Oktober 2018	Pembangunan Kota Palu Dikawal	Pembangunan Kota Palu pascagempa bumi dan tsunami direncanakan mempertimbangkan kondisi geologis.
3	Koran Tempo (Halaman, 17)	Kamis, 18 Oktober 2018	Pemulihan Sulawesi Tengah Butuh Dana Rp 22 Triliun	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan dana untuk pemulihan daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah bakal mencapai Rp 22 triliun.
4	Koran Tempo (Halaman, 17)	Kamis, 18 Oktober 2018	Berita Infografis	Mengancam Perekonomian Daerah
5	Koran Tempo (Halaman, 17)	Kamis, 18 Oktober 2018	Pemulihan Bandara dan Pelabuhan Palu Jadi Prioritas	Kementerian PUPR mengantisipasi rencana relokasi.
6	Koran Tempo (Halaman, 28)	Kamis, 18 Oktober 2018	Pemerintah Jakarta Usulkan 11 Proyek Infrastruktur Tahun Jamak	Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan 11 proyek infrastruktur dikerjakan dengan skema multiyear atau tahun jamak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.
7	Media Indonesia (Halaman, Utama)	Kamis, 18 Oktober 2018	Indeks Daya Saing Indonesia Meningkat	Indonesia berada di peringkat ke – 45 dari 140 negara dalam hal daya saing berdasarkan <i>Global Competitiveness Index 4.0</i> yang dirilis <i>World Economic Forum</i> di Jenewa, Swiss, Selasa waktu setempat.
8	Media Indonesia (Halaman, 19)	Kamis, 18 Oktober 2018	Pemulihan Sulteng Maksimal	Konsep New Palu saat ini sedang dibahas. Warga yang dulunya tinggal di daerah likuifaksi akan direlokasi di daerah yang tidak berpotensi gempa dan tsunami.
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 18 Oktober 2018	Anggaran Jembatan & Jalan Capai Rp 1 Triliun	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan anggaran pembangunan jalan dan jembatan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan ‘Palu Baru’ pascabencana gempa bumi dan tsunami mencapai Rp 1 Triliun.
10	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 18 Oktober 2018	WSKT Jajakan Proyek Tol kepada Investor	Ruas-ruas tol yang ditawarkan PT Waskita Karya Tbk. Kepada investor selama pergelaran IMF-World Bank Annual Meeting di Nusa Dua, Bali, mencuri perhatian para investor.
11	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 18 Oktober 2018	Berita Foto	Pekerja menyelesaikan pembangunan Light Rail Transit di Jakarta, Rabu.
12	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 18 Oktober 2018	DED Zona 1 Rampung Awal 2019	Kementerian PUPR menargetkan detail engineering design zona 1 proyek system pengelolaan air limbah domestik DKI Jakarta atau Jakarta Sewerage System rampung pada awal 2019.

Judul	Pembangunan Huntara Terhambat Data	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 2)		
Resume	Pembangunan hunian sementara bagi penyintas gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah masih terkendala pemutakhiran data rumah rusak.		

Pembangunan Huntara Terhambat Data

Pembangunan hunian sementara atau huntara mulai dilakukan. Ini agar kehidupan warga bisa mulai lebih baik dan sehat. Akan tetapi, ini butuh verifikasi data korban yang akurat agar penerima benar-benar pihak yang tepat.

PALU, KOMPAS — Pembangunan hunian sementara bagi penyintas gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah masih terkendala pemutakhiran data rumah rusak. Dari kebutuhan 4.000 unit, baru 1.700 unit huntara yang dibangun.

"Hunian sementara yang sedang dibangun diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau tak bisa ditinggali lagi. Pembangunannya ditargetkan rampung dua bulan ke depan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah Bartholomeus Tandigala di Palu, Rabu (17/10/2018).

Meski masih tahap tanggap darurat, pembangunan hunian sementara menjadi salah satu fokus utama. Banyak pihak yang terlibat di tahap pertama ini, baik pemerintah pusat, daerah, maupun swasta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 1.200 unit, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (100 unit), Bank Mandiri (100 unit), dan Bank BNI (300 unit).

"Untuk sekitar 3.200 huntara lainnya, kami masih menunggu proses pendataan rumah rusak berat selesai. Harapannya, pendataan itu bisa selesai dua bulan lagi. Jadi, saat huntara tahap pertama selesai, pembangunan tahap selanjutnya bisa segera dilakukan," tuturnya.

Sejak minggu lalu, pendataan dilakukan mulai dari RT/RW hingga pemerintah kota dan kabupaten. Minggu ini dimulai verifikasi ke lapangan. "Harapannya, saat verifikasi lapangan, rumah rusak berat yang tak terdata ditemukan," katanya.

Kepala Satgas Kementerian PUPR untuk Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana Sulteng Arie Setiadi Murwanto mengatakan, huntara akan dibangun di tujuh kecamatan di Kota Palu, dua kecamatan di Kabupaten Sigi, dan satu kecamatan di Donggala. Huntara dibuat berbentuk rumah panggung berdinding kayu. Tujuannya, meminimalkan terpaan hawa panas di Sulteng.

Berukuran 12 meter x 26,4 meter per unit, Arie juga mengatakan, setiap huntara bisa diisi 12 rumah tangga. Satu unit disediakan empat kamar mandi dan empat toilet. "Di tiap lokasi pembuatan huntara juga akan dibangun SD dan PAUD, puskesmas pembantu, dan tenda khusus pemulihan trauma," kata Arie.

Tenda sekolah tiba

Rabu (17/10), 100 tenda sekolah darurat tiba di Kota Palu. Sebanyak 90 tenda bantuan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak (Unicef). Adapun 10 tenda lainnya dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC). Khusus bantuan YSTC, tenda-tenda itu langsung dipasang pada Rabu siang.

"Tenda darurat dibangun di enam sekolah di Palu dan empat sekolah di Sigi. Semuanya adalah sekolah yang rusak akibat gempa. Selain tenda, kami berencana membangun ruang kelas sementara berbahan kayu sebanyak 40 ruangan beserta perlengkapan penunjang sekolah lainnya. Lokasinya masih dicari," tutur Manager Program Pendidikan dan Perlindungan YSTC Wiwied Trisnadi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng Irwan Lahace mengatakan, tenda bantuan Unicef akan dibangun secepatnya di beberapa sekolah

yang rusak parah di Palu, Donggala, dan Sigi hari ini. "Kami juga masih menunggu sekitar 360 tenda sekolah darurat Unicef lainnya. Tenda-tenda itu menurut rencana dikirimkan bertahap dari Jakarta dan Balikpapan menuju Palu menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara," kata Irwan.

Di Bandung, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penyaluran bantuan langsung berupa pembiayaan jaminan hidup kepada korban gempa dan tsunami di Sulteng masih menunggu rekomendasi dan verifikasi dari pemda. "Jaminan hidup diberikan kepada korban bencana yang sudah menempati hunian sementara atau tetap. Saat ini belum ada korban yang menempati hunian tersebut karena baru mulai dibangun. Data penerimanya terlebih dahulu diverifikasi oleh pemerintah daerah," ujar Agus. Sesuai ketentuan, bantuan itu sebesar Rp 10.000 per jiwa dalam sehari dan diberikan selama 30 hari dan dapat diperpanjang sampai 90 hari.

Di Jakarta, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Hendri DS Budiono menyatakan, akademisi dan alumni UI, khususnya arsitektur dan teknik, terpanggil mencari solusi pemulihan masyarakat terdampak bencana yang dapat diterapkan langsung dengan cepat.

"Kami sudah berhasil membangun sekolah Indonesia tanggap bencana yang bisa dibangun sekitar satu bulan dan hunian sementara yang dibangun sekitar 4 jam pascagempa Lombok. Ini bukan sekolah sementara, tetapi sekolah permanen yang justru dibuat lebih baik dari yang lama," papar Hendri.

(IDO/AIN/TAM/ELN)

Judul	Pembangunan Kota Palu Dikawal	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 21)		
Resume	Pembangunan Kota Palu pascagempa bumi dan tsunami direncanakan mempertimbangkan kondisi geologis.		

Pembangunan Kota Palu Dikawal

BANDUNG, KOMPAS — Pembangunan Kota Palu pascagempa bumi dan tsunami direncanakan mempertimbangkan kondisi geologis. Koordinasi antarkementerian masih tahap perundingan, mempertimbangkan aspek-aspek kebencanaan dan lainnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Rabu (17/10/2018), di Bandung, menyatakan, pemerintah melalui Badan Geologi akan melakukan pendampingan untuk memberikan rekomendasi wilayah pembangunan Palu pascabencana. Rekomendasi ini meliputi kawasan hunian dan bangunan serta wilayah yang disarankan untuk tidak dibangun sama sekali.

"Asistensi dilakukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu untuk membangun kembali daerah bencana. Sekarang masih tahap perundingan karena pembangunan ini dengan kerja sama antarkementerian," ujar Jonan pada kuliah umum di Institut Teknologi Bandung.

Infrastruktur di Palu, terutama kelistrikan, telah diperbaiki dan mulai berjalan normal. "Kelistrikan sudah hampir selesai. Semua sudah berjalan kecuali daerah-daerah yang rumahnya ambruk," tutur Jonan.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMG), Badan Geologi, Sri Hidayati menjelaskan, salah satu pertimbangan yang akan dibicarakan dalam rancangan rekomendasi ini adalah posisi Patahan Palu-Koro dalam wilayah pembangunan. Saat ini, seluruh tim sedang penelitian pascabencana sebagai bahan permodelan ulang dalam mitigasi bencana di wilayah ini.

Sebelumnya, zona pinggir pantai Palu dengan jarak 1 kilometer dari bibir pantai memang masuk zona merah. Pemetaan baru yang akan dikeluarkan Badan Geologi itu, kata Sri, jadi pertimbangan penting dalam pembangunan Palu. Tidak hanya dari mitigasi bencana, permodelan itu juga mempertimbangkan kondisi tanah akibat gempa.

"Kami sedang melakukan lagi pemetaan landaan tsunami hasil lapangan. Secara kasar, dari segi mitigasinya, daerah dilalui patahan tak disarankan untuk bangunan. Namun, semua keputusan di Badan Geologi karena banyak pertimbangan selain mitigasi, seperti keadaan air tanah dan lainnya," tutur Sri.

Hal senada diungkapkan ahli gempa ITB, Irwan Meilano. Dalam rekonstruksi pembangunan Palu pascagempa, pemerintah perlu menetapkan zona batas pembangunan di daerah patahan. "Area batas ini tidak boleh dibangun. Pemerintah bisa saja menggunakan area ini untuk penghijauan, tetapi harus jauh dari permukiman untuk menghindari korban ketika gempa susulan terjadi," ujarnya.

Ketelitian juga diperlukan untuk menentukan area pembangunan pascagempa. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa faktor sebelum mengeluarkan kebijakan pembangunan, di antaranya kualitas data yang dikumpulkan untuk melihat jangkauan kerusakan dan pertimbangan untuk menghindari dampak kerusakan dari gempa yang berpotensi muncul di patahan ini.

"Jangan sampai karena terburu-buru mengeluarkan data, masyarakat jadi dirugikan. Perlu kajian detail sesuai jenis-jenis patahannya karena patahan di Palu saja bervariasi. Apalagi di tempat lain. Area terdampak lebih baik lagi menggunakan peta topografi tiga dimensi," ujar Irwan. (RTG)

Judul	Pemulihan Sulawesi Tengah Butuh Dana Rp 22 Triliun	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 17)		
Resume	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan dana untuk pemulihan daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah bakal mencapai Rp 22 triliun.		



Warga yang terkena dampak gempa membawa barang layak pakai sekitar reruntuhan rumahnya di Bataroa, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, 11 Oktober lalu.

PEMULIHAN SULAWESI TENGAH BUTUH DANA RP 22 TRILIUN

Permukiman dan infrastruktur fisik jadi prioritas.

Yohanes Paskalis Pae Dale
yohanes.paskalis@tempo.co.id

JAKARTA—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan dana untuk pemulihan daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah bakal mencapai Rp 22 triliun. Kebutuhan dana tersebut tak hanya untuk memulihkan infrastruktur fisik, tapi juga kondisi sosial, budaya, dan perekonomian. "Taksiran kasar itu dari pengamatan tim lapangan dan proyeksi Bappenas," kata Perencana Madya Kedepangan Pengembangan Regional Bappenas, Suprayoga Hadi, kepada

Tempo, kemarin.

Tak merinci detail nilainya, Hadi memaparkan kebutuhan dana telah menghitung potensi kerugian yang meliputi lima bidang, yakni permukiman, infrastruktur perkotaan dan perhubungan, aspek sosial, fasilitas usaha, serta layanan pemerintah lintas sektor. Adapun total kerugian akibat bencana yang terjadi akhir bulan lalu tersebut diperkirakan jauh lebih besar. "Jadi itu (Rp 22 triliun) hanya untuk apa yang perlu dipulihkan," kata dia.

Kerusakan di tiga daerah yang terkena dampak utama, yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, sebelum-

nya telah diproyeksikan bakal melampaui dampak bencana gempa bumi di tujuh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada akhir Juli hingga awal Agustus lalu.

Sebagai perbandingan, Bappenas telah menghitung potensi kerugian di NTB mencapai Rp 15,4 triliun. Adapun kebutuhan dana untuk pemulihannya sekitar Rp 12 triliun. Dalam rapat kabinet yang berfokus pada penanganan pascabencana di Palu dan Lombok, Selasa lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana di NTB dan Sulawesi Tengah dipercepat. Pembenahan meliputi penguatan edukasi dan prosedur kebencanaan, percepatan dana bantuan rumah, serta pemulihan kegiatan pemerintah dae-

rah di lokasi yang terkena dampak bencana. Pemerintah kini tengah menyiapkan pendanaan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Sulawesi Tengah lewat kombinasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hibah.

Pemerintah juga telah mendapatkan tawaran pinjaman dari sejumlah lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, yang masing-masing menyiapkan US\$ 1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun. (Koran Tempo edisi 17 Oktober 2018: "Kombinasi APBN dan Hibah Dana Rekonstruksi Palu")

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beserta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memulai tahap pemulihan hunian pekan ini. Hadi mengatakan permukiman memang menjadi sektor dengan kerugian terbesar. "Itu masih rencana pembangunan wilayah terdampak yang ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan," kata Hadi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR,

Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan langkah mere-lokasi hunian masyarakat, termasuk yang hilang akibat pencairan tanah alias likuefaksi, tengah berjalan. Khusus untuk kebutuhan pemulihan bangunan fisik diperkirakan menelan biaya Rp 5-6 triliun.

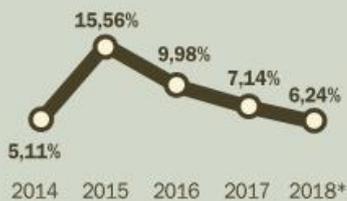
"Sementara Bappenas perhitungannya meliputi kebutuhan ekonomi, usaha berkelanjutan, dan banyak aspek lain," kata Danis menjelaskan perbedaan taksiran kebutuhan dana pemulihan Sulawesi Tengah. ● AHMAD FAIZ IRAWI SANI

Judul	Berita Infografis	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 17)		
Resume	Mengancam Perekonomian Daerah		

Mengancam Perekonomian Daerah

Tiga daerah yang terkena dampak bencana paling parah di Sulawesi Tengah, yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, tergolong sebagai penopang utama perekonomian provinsi tersebut. Produk domestik regional bruto (PDRB) ketiganya tahun lalu mencapai Rp 39,3 triliun, sepertiga dari total PDRB Sulawesi Tengah. Rangkaian gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang menghantam kawasan ini dikhawatirkan akan menekan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tiga tahun terakhir cenderung melambat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah



CATATAN: *) HINGGA SEMESTER I-2018 | FIGURA: PDRI 2017 BERBASIS RANGKAIAN HARGA BERIKUT | AROFNR | SUMBER: RPS

DAKAN, MENYALIN, MEMUBLIKASIKAN FILE TANPA IZIN TERTULIS DARI TEMPO MEDIA GROUP.

Judul	Pemulihan Bandara dan Pelabuhan Palu Jadi Prioritas	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 17)		
Resume	Kementerian PUPR mengantisipasi rencana relokasi.		

Pemulihan Bandara dan Pelabuhan Palu Jadi Prioritas

Kementerian PUPR mengantisipasi rencana relokasi.

Yohanes Paskalis Pae Dale
yohanes.paskalis@tempo.co.id

JAKARTA — Infrastruktur perhubungan Sulawesi Tengah menjadi prioritas pemulihan sembari menyiapkan tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Optimalisasi sarana perhubungan udara telah dilakukan bertahap lewat gelontoran dana Rp 80 miliar untuk perbaikan Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu. "Sektor darat dan laut juga mulai optimal," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemarin.

Menurut Budi, pembenahan sarana perhubungan akan terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pekan lalu memperpanjang masa darurat bencana hingga Jumat pekan depan.

Juru bicara Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (AirNav Indonesia), Yohanes Sirait, mengatakan lalu lintas penerbangan dari dan menuju Kota Palu berangsur normal. Maskapai komersial kini dapat mengoperasikan pesawat besar karena landas pacu efektif sepanjang 2.250 meter telah diperbaiki.

Menurut Yohanes, saat ini pergerakan pesawat telah mencapai 150 keberangkatan dan kedatangan per hari. "Itu termasuk bantuan. Tapi sebagian besar untuk penerbangan komersial," ujarnya.

Adapun Kepala Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Gus Rional, mengatakan perbaikan di Pelabuhan Pantoloan, Palu, kini menyisakan sejumlah kerusakan ringan. Terletak di Kecamatan Tawaeli, kawasan pelabuhan seluas 200 hektare ini telah dapat disinggahi kapal penumpang dan logistik.

Adapun Pelabuhan Donggala kini telah dapat difungsikan untuk kapal dengan panjang kurang dari 60 meter. "Hanya crane pelabuhan yang masih dibenahi, tapi karena ka-



Pekerja memperbaiki ruangan yang rusak akibat gempa di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu Sulawesi Tengah, Senin lalu.

“
Karena kami harus penuh kebutuhan harian, seperti air minum, sanitasi, lalu hunian sementara.
”

pal juga punya fasilitas sejenis, bongkar-muat tak bermasalah,” kata Rional kepada Tempo.

Pemulihan fasilitas perhubungan ini dilakukan di tengah rencana pemerintah merelokasi daerah yang terkena dampak palingserhad dalam bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi akhir bulan lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai memilah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan “Palu Baru” yang diperkirakan akan menelan biaya Rp 5-6 triliun.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU,

Danis Hidayat Sumadilaga, memproyeksikan unit kerja yang dipimpinnya akan menggarap pekerjaan dengan alokasi dana terbesar, yakni sekitar Rp 3 triliun. “Karena kami harus penuh kebutuhan harian, seperti air minum, sanitasi, lalu hunian sementara,” kata Danis kepada Tempo, kemarin.

Meski demikian, Danis meyakini perhitungan kebutuhan total rehabilitasi dan rekonstruksi bisa bertambah. Pasalnya, penghitungan dampak kerusakan di Sulawesi Tengah masih berlangsung. “Alokasi ini kan baru berdasarkan identifikasi awal. Masih ada rencana induk yang harus diselesaikan lintas kementerian,” kata dia.

Penyusunan rencana induk yang dimaksud akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang hingga Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelumnya, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeliono mengungkapkan sedikitnya tiga daerah potensial un-

tuk menjadi lokasi pembangunan Palu Baru, yakni Kelurahan Duyu dan Kelurahan Tondo yang masih berada di wilayah Palu, serta Desa Pombewe di Kabupaten Sigi.

Direktur Jenderal Bina Marga, Sugiyartanto, mengatakan kementerannya masih memaksimalkan dana internal untuk rencana Palu Baru. Namun, angkanya terbilang kecil. “Kan ada sebagian penghematan saat pengerjaan proyek di PU, tapi kecil, misalnya, hanya Rp 1-5 miliar. Itu dikumpulkan dari setiap direktorat jenderal,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, alokasi untuk Direktorat Jenderal Bina Marga dalam rehabilitasi bencana di Palu dan sekitarnya diproyeksikan sebesar Rp 1 triliun. Jumlah itu difokuskan untuk perbaikan jalan nasional dan fasilitas umum lain yang longsor dan terbelah. “Kami estimasikan juga untuk akses ke Palu Baru. Bisa preservasi atau pembangunan, tapi lokasinya harus difinalkan dulu,” kata Sugiyartanto.

● NIMRO FAZ BINO SAM | HENDARTO HANKE

Skema Penanganan Pascabencana

Pemerintah tengah menyusun rencana induk penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah. Penghitungan kerugian materiil akibat gempa dan tsunami masih berlangsung seiring dengan diperpanjang periode tanggap darurat hingga 26 Oktober mendatang.

Berikut iri kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana:

■ DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

■ TAHAP PEMULIHAN BENCANA PALU:

● Masa tanggap darurat pertama

Durasi: 2 pekan (28 September-11 Oktober)

Aktivitas: evakuasi korban, pembukaan akses logistik, pembersihan longsor dan puing.

● MASA TANGGAP DARURAT TAMBAHAN

Durasi: 2 pekan (13-26 Oktober)

Aktivitas: evakuasi skala kecil, pembangunan hunian sementara, pencarian hunian baru.

● PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN:

Durasi: 2-4 pekan (difokuskan sesuai dengan tanggap darurat dengan target penyelesaian awal Desember 2018)

Aktivitas: pengumpulan data kerusakan oleh Bappenas dan BNPE.

● FORMULASI RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Durasi: 1-2 bulan

Aktivitas: penentuan kebutuhan pemulihan oleh lintas kementerian dan lembaga.

● PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Durasi: dua tahun (target penyelesaian pada 2020)

Aktivitas: pembangunan bertahap termasuk relokasi, monitoring, dan evaluasi.

YOHANES PASKALIS | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | SUMBER: BNPE, WAWANCARA BAPPENAS

Judul	Pemerintah Jakarta Usulkan 11 Proyek Infrastruktur Tahun Jamak	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 28)		
Resume	Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan 11 proyek infrastruktur dikerjakan dengan skema multiyear atau tahun jamak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.		

Pemerintah Jakarta Usulkan 11 Proyek Infrastruktur Tahun Jamak

Proses panjang dari lelang, perencanaan, sampai konstruksi bisa lebih dari setahun.



TEMPO/ILHAM HADYAT

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan 11 proyek infrastruktur dikerjakan dengan skema *multiyears* atau tahun jamak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. Sejumlah proyek, seperti pembangunan rumah susun dan jembatan, itu rencananya dimulai pada 2019-2021.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan menuturkan sebagian proyek infrastruktur tersebut, seperti pembangunan dan revitalisasi rumah susun, tidak bisa rampung dalam setahun. "Justru dengan dikerjakan beberapa tahun bisa tuntas," kata dia di Tangerang Selatan, kemarin.

Pada September lalu, Anies mengirim surat usul kegiatan tahun jamak 2019-2021 kepada Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Prasetyo Edi Marsudi. Usul itu berisi sebelas proyek infrastruktur tersebut yang totalnya mencapai Rp 2,13 triliun.

Kepala Bidang Sempang dan Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan proses pembangunan proyek-proyek infrastruktur, seperti peningkatan jembatan di Jalan Lodan, pembangunan simpang tak sebidang Lenteng Agung, dan pembangunan *underpass* Senen Extension, membutuhkan waktu panjang. "Karena dari lelang hingga kegiatan fisiknya membutuhkan waktu yang melampaui satu tahun anggaran," ujarnya.

Adapun Sekretaris Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menilai proyek-proyek infrastruktur tersebut memang

tidak bisa dikerjakan dalam tahun tunggal. "Faktanya memang tidak bisa diselesaikan," ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Meli Budiastuti, memastikan pembangunan rumah susun dalam bentuk tower tidak bisa dilaksanakan dalam tahun tunggal. "Diperlukan sekitar 14 bulan untuk membangun rumah susun tower 16 lantai," ujarnya.

Dinas Perumahan mengusulkan pembangunan Rumah Susun PIK Pulogadung, Cakung Barat, dan Jalan Inspeksi BKT dikerjakan dengan skema tahun jamak. Begitu juga revitalisasi Rumah Susun Karang Anyar dan Penjaringan.

Meli mengungkapkan, pada APBD 2018,

Dinas mengajukan pembangunan Rumah Susun Jalan Inspeksi BKT, PIK Pulogadung, dan revitalisasi Rumah Susun Karang Anyar dikerjakan secara tahun tunggal. Tapi akhirnya tiga proyek itu dicoret lantaran tidak cukup waktu untuk merealisasinya. "Kami coba tahun tunggal enggak bisa, padahal kami sudah ajukan untuk lelang pendahuluan dengan start pada awal Januari."

Menurut Meli, revitalisasi rumah susun juga diusulkan dengan skema tahun jamak. Proyek itu bisa lebih lama lagi karena

rumah susun yang direvitalisasi akan dirobohkan terlebih dulu, lalu dibangun ulang. Apalagi Dinas harus memindahkan penghuninya ke rumah susun lain sebelum proyek dilaksanakan.

Meli belum bisa menyampaikan dampak pembangunan rumah susun yang dikerjakan secara tahun jamak, seperti pendaftaran penghuni. Dia menyatakan, selama masyarakat mengajukan permohonan menjadi penghuni rumah susun tapi stok unitnya kurang, DKI akan terus membangun.

● LANI DWANA

Pekerjaan Bertahun-tahun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan 11 proyek infrastruktur dengan pembiayaan *multiyears* atau tahun jamak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019. Usul tersebut disampaikan melalui surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Prasetyo Edi Marsudi pada 10 September lalu.

Berikut ini daftar usul kegiatan tahun jamak itu:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Nilai Anggaran	Anggaran 2019	Anggaran 2020	Anggaran 2021
1	Pembangunan Rumah Susun PIK Pulogadung	3 Tahun	Rp 300 miliar	Rp 75 miliar	Rp 150 miliar	Rp 75 miliar
2	Pembangunan Rumah Susun BKT	3 Tahun	Rp 200 miliar	Rp 50 miliar	Rp 100 miliar	Rp 50 miliar
3	Revitalisasi Rumah Susun Karang Anyar	3 Tahun	Rp 200 miliar	Rp 50 miliar	Rp 100 miliar	Rp 50 miliar
4	Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat (tiga tower)	3 Tahun	Rp 300 miliar	Rp 75 miliar	Rp 150 miliar	Rp 75 miliar
5	Revitalisasi Rumah Susun Penjaringan	3 Tahun	Rp 400 miliar	Rp 60 miliar	Rp 220 miliar	Rp 120 miliar (empat tower)
6	Peningkatan Jembatan Jalan Lodan	2 Tahun	Rp 63,3 miliar	Rp 6,5 miliar	Rp 56,8 miliar	-
7	Peningkatan Jembatan Akses Rumah Susun Pesakih	2 Tahun	Rp 49,6 miliar	Rp 5,1 miliar	Rp 44,5 miliar	-
8	Peningkatan Jembatan Jalan Pluit Selatan Raya	2 Tahun	Rp 45,3 miliar	Rp 4,6 miliar	Rp 40,7 miliar	-
9	Pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu	2 Tahun	Rp 37,3 miliar	Rp 3,8 miliar	Rp 33,5 miliar	-
10	Pembangunan Sempang Tidak Sebidang Lenteng Agung	3 Tahun	Rp 227 miliar	Rp 95,3 miliar	Rp 99 miliar	Rp 32,7 miliar
11	Pembangunan <i>underpass</i> Senen Extension	3 Tahun	Rp 316 miliar	Rp 91,4 miliar	Rp 122 miliar	Rp 102,6 miliar
Total						Rp 2,13 triliun

● GANGSAR PARIKESIT | SUMBER: PEMERINTAH DKI

Judul	Indeks Daya Saing Indonesia Meningkat	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, Utama)		
Resume	Indonesia berada di peringkat ke – 45 dari 140 negara dalam hal daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index 4.0 yang dirilis World Economic Forum di Jenewa, Swiss, Selasa waktu setempat.		

Indeks Daya Saing Indonesia Meningkat

INDONESIA berada di peringkat ke-45 dari 140 negara dalam hal daya saing berdasarkan *Global Competitiveness Index 4.0* yang dirilis World Economic Forum (WEF) di Jenewa, Swiss, Selasa (16/10) waktu setempat.

Peringkat Indonesia itu lebih baik daripada tahun lalu yang berada di posisi 47. Di dalam indeks tersebut, Indonesia unggul dari Meksiko yang berada di posisi 46, Filipina (56), India (58), Turki (61), dan Brasil (72). Namun, peringkat Indonesia masih berada di bawah Malaysia dan Thailand yang masing-masing menempati peringkat ke-25 dan ke-38.

Ada sejumlah komponen yang diteliti dalam indeks tersebut, antara lain institusi, infrastruktur, kesiapan teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, pangsa pasar, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi.

‘Metodologi *global competitiveness report* terbaru juga memberikan pandangan tentang kesiapan negara untuk masa depan terutama menghadapi industri 4.0, modal sosial, hingga dukungan terhadap bisnis disruptif, dan kekhawatiran utang’, tulis WEF.

Terkait dengan nilai pada setiap komponen, Indonesia mencatat skor 58 atau peringkat 48 dalam hal institusi. Dalam hal infrastruktur, Indonesia berada di peringkat ke-71, atau skor 67. Soal pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia berada pada peringkat ke-50 dengan skor 61. Kemudian, dalam hal stabilitas makroekonomi, Indonesia berada di peringkat ke-51 dengan skor amat tinggi, 90.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi naiknya indeks daya saing Indonesia ini. Dia pun menegaskan pemerintah akan tetap berupaya meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat dunia.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai kenaikan peringkat tersebut secara umum dapat membantu Indonesia untuk menarik investasi, khususnya investasi asing.

Namun, imbuhnya, pemerintah akan tetap bekerja keras untuk meningkatkan peringkat daya saing global. “Jadi, ya memang kita harus bekerja lebih keras. Infrastruktur, walaupun sudah dibangun banyak, tetap saja masih kurang untuk kebutuhan seluruh negara dan mendorong investasi,” kata Bambang. (Adi/Nur/X-10)

Judul	Pemulihan Sulteng Maksimal	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 19)		
Resume	Konsep New Palu saat ini sedang dibahas. Warga yang dulunya tinggal di daerah likuifaksi akan direlokasi di daerah yang tidak berpotensi gempa dan tsunami.		

Pemulihan Sulteng Maksimal

Konsep New Palu saat ini sedang dibahas. Warga yang dulunya tinggal di daerah likuifaksi akan direlokasi di daerah yang tidak berpotensi gempa dan tsunami.

BAYU ANGGORO
anggoro@mediaindonesia.com

PEMERINTAH dinilai sudah maksimal dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Langkah evakuasi dan rehabilitasi terus dilakukan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan banyak pihak, bahkan dari luar negeri menyatakan pemerintah sudah maksimal dalam mengatasi dampak bencana alam tersebut. "Alhamdulillah. (Penilaian) ini

bukan menurut kami, tapi banyak pihak, bahkan dari luar negeri. Penanganan bencana bisa berjalan baik dan relatif cepat," kata Agus di Bandung, kemarin.

Dia menjelaskan, meski masih dalam kondisi tanggap darurat, pemerintah berhasil memperbaiki sejumlah aspek penting yang sangat dibutuhkan korban bencana tersebut.

"Sekarang kita sudah memasuki kebijakan untuk merestorasi ekonomi," katanya.

Sebagai contoh, dia menyebut pasokan listrik di Kota Palu, Sigi, dan Donggala sudah mencapai 100%. Ketersediaan listrik ini sangat pen-

ting untuk menggerakkan berbagai aktivitas warga.

"Kegiatan ekonomi sudah jalan. Pasar-pasar sejak hari ketujuh (pascabencana) sudah jalan, toko-toko sudah buka," kata Mensos.

Selain itu, pemerintah akan merelokasi hunian tetap warga yang berada di dalam area likuifaksi.

"Di Sulawesi Tengah banyak sekalah-lahan-lahan dampak bencana akibat likuifaksi. Jadi, tanah di atasnya tidak bisa dibangun," katanya.

Lahan untuk relokasi rumah warga harus aman dari gempa dan tsunami.

Dalam mewujudkan konsep Kota Palu yang baru ini, pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan pengganti.

"Untuk New Palu, sekarang sedang *micro mapping*. Wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana akan kami hindari," pungkasnya.

Saat ini 19 SPBU Pertamina yang sempat terdampak bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah mulai beroperasi. Sembilan belas SPBU itu bagian dari total 23 SPBU yang beroperasi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.

"Saat ini 17 SPBU di Kota Palu telah beroperasi. Untuk 15 SPBU beroperasi normal, sedangkan dua SPBU lainnya, yakni SPBU Camicumi dan SPBU Mamboro melayani pembelian BBM dengan menggunakan mobil tanki dispenser karena kondisi SPBU dalam perbaikan," ujar Unit Manager Communication & CSR Pertamina Marketing Operation Region VII M Roby Hervindo.

Sementara itu, di Donggala ada tiga SPBU dan satu SPBU di Sigi yang seluruhnya sudah beroperasi.

Polda Jawa Timur mengirim 14 psikolog untuk memulihkan psikis warga terdampak gempa bumi di Kepulauan Sapudi, Kabupaten

Sumenep.

"Selain pengiriman bantuan logistik dan upaya rehabilitasi rumah korban bencana gempa, Polda Jawa Timur mengerahkan 14 psikolog guna pemulihan psikis warga terdampak bencana," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, di Surabaya.

Hingga saat ini masih banyak warga yang trauma dan terganggu akibat gempa di Sapudi.

Inventarisasi rawan gempa

DPRD Sumatra Barat mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan langkah inventarisasi terhadap masyarakat yang berdomisili di daerah rawan gempa dan tsunami.

"Kita berharap seluruh selter layak untuk digunakan, jika pada daerah bibir pantai lakukan penambahan," kata Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat, Arkadius Datuak Intan Bano. (YH/RS/Aya/N-2)

Judul	Anggaran Jembatan & Jalan Capai Rp 1 Triliun	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan anggaran pembangunan jalan dan jembatan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan 'Palu Baru' pascabencana gempa bumi dan tsunami mencapai Rp 1 Triliun.		

Anggaran Jembatan & Jalan Capai Rp1 Triliun

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan anggaran pembangunan jalan dan jembatan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan 'Palu baru' pascabencana gempa bumi dan tsunami mencapai Rp1 triliun.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan bahwa kebutuhan pasti biaya masih menunggu penyusunan rencana induk pembangunan kembali Kota Palu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat.

Berdasarkan wacana awal, pembangunan tidak dilakukan di wilayah lama yang terdampak gempa, tsunami, dan likuifaksi, tetapi di tiga kota lain yang berdekatan dengan Palu, yakni Duyu, Tondo, dan Pembewe.

"Kalau estimasi awal kami sekitar Rp1 triliun untuk kebutuhan Bina Marga. Ini untuk perbaikan jalan yang retak, terbelah, dan juga akses menuju pembangunan, misalnya, ke sumber air atau fasilitas umum [Kota Palu baru]," kata Sugiyartanto, Rabu (17/10).

Perkiraan tersebut, katanya, masih bisa berubah berdasarkan penetapan rencana induk dari Bappenas.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pembangunan Palu Baru di tiga kota menghabiskan biaya Rp5 triliun—Rp6 triliun. Biaya tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan akses jalan, ketersediaan air, permukiman, dan pembangunan fasilitas

umum.

Sugiyartanto menjelaskan bahwa anggaran tersebut rencananya dialokasikan dari sisa pinjaman yang tidak terpakai dari setiap direktorat kepada pemberi pinjaman yang sudah disetujui perubahan fungsinya.

Selain sisa pinjaman dari Kementerian PUPR, ujarnya, sisa pinjaman lainnya juga akan diakomodasi dari Bappenas. Anggaran juga akan bersumber dari penghematan yang dilakukan Kementerian PUPR.

"Sisa pinjaman yang tidak terpakai dan sudah atas persetujuan lender digunakan untuk anggaran bencana ini, sebagian dari Kementerian PUPR dan sebagian dari Bappenas," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) Tumiyana menyatakan kesiapan perusahaannya untuk terlibat dalam pembangunan ulang Kota Palu di wilayah baru nantinya. Namun, saat ini penanganan pascabencana menjadi prioritas.

"Kami pasti terlibat pembangunan di Palu," katanya saat berkunjung ke *Bisnis Indonesia*, Rabu (17/10).

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia Budi Harto mengatakan bahwa sedikitnya 10 perusahaan non-BUMN yang tergabung dalam asosiasi itu menyatakan kesediaan membantu proses pemulihan bencana di Sulawesi Tengah tersebut.

BUMN siap membantu pemulihan Palu setelah sebelumnya juga berkontribusi untuk rekonstruksi Lombok.

(Irene Agustine)

Judul	WSKT Jajakan Proyek Tol kepada Investor	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Ruas-ruas tol yang ditawarkan PT Waskita Karya Tbk. kepada investor selama pergelaran IMF-World Bank Annual Meeting di Nusa Dua, Bali, mencuri perhatian para investor.		

WSKT Jajakan Proyek Tol kepada Investor

NUSA DUA — Ruas-ruas tol yang ditawarkan PT Waskita Karya Tbk. kepada investor selama pergelaran IMF-World Bank Annual Meetings di Nusa Dua, Bali, mencuri perhatian para investor.

M. Nurhadi Pratomo
email: nurhadi.pratomo@bisnis.com

Berdasarkan data yang dihimpun *Bisnis*, terdapat 15 ruas yang ditawarkan emiten berkode saham WSKT tersebut. Nama-nama ruas tersebut terpancang di Paviliun Indonesia selama penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meetings.

Secara mendetail, ruas-ruas yang ditawarkan tersebut antara lain Solo—Ngawi, Ngawi—Kertosono, Semarang—Batang, Bekasi—Cawang—Kampung Melayu, Kayu Agung—Palembang—Betung, Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi, Cimanggis—Cibitung, Ciawi—Sukabumi, Depok—Antasari, Cilengsi—Sumedang—Dawuan, Cibitung—Cilincing, dan Balikpapan—Penajam.

Direktur Utama WSKT I Gusti Ngurah Putra menjelaskan bahwa perseroan memang ingin melakukan divestasi.

Strategi tersebut khususnya diterapkan untuk ruas tol yang memang merupakan investasi perseroan.

Putra mengungkapkan bahwa perseroan telah melakukan pertemuan dengan sejumlah investor selama di Bali. Hal itu bertujuan untuk melakukan peninjauan investasi di ruas tol yang ditawarkan perseroan.

"Ada pertemuan dengan beberapa investor," ujarnya kepada *Bisnis* di sela-sela perhelatan tahunan tersebut, pekan lalu.

Dia mengklaim bahwa ruas tol Trans-Jawa paling diminati para calon investor karena berada di wilayah paling padat di Indonesia.

Menurutnya, perseroan memang belum menandatangani kesepakatan dengan investor. Saat ini masih dilakukan tindak lanjut terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh para calon investor.

"Karena barang [proyek]-nya besar maka masih teliti dokumen dan data-datanya. Kami akan berusaha menyediakan sevalid mungkin," jelasnya.

Berdasarkan pemberitaan *Bisnis* sebelumnya, WSKT melalui anak usahanya yakni PT Waskita Toll Road, membidik

► **WSKT memang ingin melakukan divestasi khususnya untuk ruas tol yang memang merupakan investasi perseroan.**

► **META berencana mengajukan prakarsa dua hingga tiga ruas tol untuk menambah portofolio bisnis perseroan.**

dana segar Rp3 triliun melalui divestasi dua ruas tol.

Entitas anak usaha tersebut tengah memproses divestasi saham di ruas tol Bekasi—Cawang—Kampung Melayu dan Kayu Agung—Palembang—Betung yang ditargetkan rampung pada 2018.

Dalam divestasi tersebut, kata Putra, investor diberi kesempatan untuk menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, para pemilik dana segar berpeluang memiliki lebih dari 60% saham di dua ruas tol tersebut.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Ahmad Bambang mengatakan bahwa penjualan ruas tol yang dilakukan WSKT agar perseroan dapat berinvestasi di ruas lain.

Selain itu, apabila dana masuk akan memberi alternatif sumber pendanaan di luar penerbitan obligasi.

TOL PRAKARSA

Pada kesempatan berbeda, PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) berencana mengajukan prakarsa dua hingga tiga ruas tol untuk menambah portofolio bisnis perseroan di lini infrastruktur jalan tol.

Direktur Utama META Muhammad Ramdani Basri mengungkapkan bahwa perusahaan masih memiliki rencana mengajukan prakarsa ruas tol setelah Cikunir—Ulujami.

Saat ini, perseroan menyiapkan studi

untuk sejumlah ruas.

"Masih ada 2—3 ruas lagi yang akan diprakarsa tidak berhenti di situ, kemudian kami akan mengembangkan lagi," ujarnya kepada *Bisnis* di Nusa Dua, pekan lalu.

Menurutnya, perseroan akan mengambil porsi kepemilikan 85% di ruas tol Cikunir—Ulujami. Sisanya, akan dibagi dengan anggota konsorsium lainnya yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT Acset Indonesia Tbk.

Jalan tol Cikunir—Ulujami memiliki panjang 28,86 kilometer. Nilai investasi untuk pembangunan proyek tersebut mencapai Rp22,50 triliun.

Pekan lalu, META telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

IIF akan memberi dukungan pembiayaan prakarsa perusahaan jalan tol Cikunir—Ulujami.

Ramdani menjelaskan bahwa IIF akan mendukung pendanaan untuk pembangunan ruas tol tersebut. Bentuk skema yang diberikan dapat berupa ekuitas, *refinancing*, dan penjaminan. "Kami juga mengajak IIF untuk memegang saham di atas [jalan tol Cikunir—Ulujami]."

Saat ini, tuturnya, perseroan ingin menjadi inisiator untuk mengambil proyek infrastruktur. Hal itu sejalan dengan keseriusan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah.

Sebagai alternatif pendanaan, META tidak hanya berpaku kepada skema pembiayaan konvensional. Artinya, perseroan akan mengembangkan skema-skema yang dapat menjadi alternatif.

Di bisnis jalan tol, misalnya, META akan melepas sebagian kepemilikan saham di ruas tol setelah nilai proyek tersebut naik.

"Misalnya, begini. Saya sudah punya jalan tol, tidak saya *keep*, tetapi saya lepas 25%. Kepemilikan tetap mayoritas tetapi setelah nilainya menjadi 15 kali lebih besar kita undang asing untuk masuk kemudian dapat uang untuk mengembangkan lagi," jelasnya.

Perseroan juga mengejar pengembangan bisnis pembangkit listrik sampai dengan 300 megawatt. Baru baru ini, META baru menyelesaikan akuisisi 80% kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Siantan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

"Yang di portofolio saat ini kurang lebih US\$1,70 miliar. Tiga fokus kami yakni jalan tol, biomassa, dan air," jelasnya. ■

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Pekerja menyelesaikan pembangunan Light Rail Transit di Jakarta, Rabu.		



Bisnis/Nurul Hidayat

Pekerja menyelesaikan pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di Jakarta, Rabu (17/10). Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat memproyeksi sektor konstruksi akan tetap

memberi sumbangsih signifikan terhadap perekonomian nasional kendati dibayangi penundaan sejumlah proyek infrastruktur.

Judul	DED Zona 1 Rampung Awal 2019	Tanggal	Kamis, 18 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian PUPR menargetkan detail engineering design zona 1 proyek system pengelolaan air limbah domestic DKI Jakarta atau Jakarta Sewerage System rampung pada awal 2019.		

DED Zona 1 Rampung Awal 2019

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat menargetkan *detail engineering design* zona 1 proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik DKI Jakarta atau Jakarta Sewerage System rampung pada awal 2019.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa *detail engineering design* (DED) untuk zona 1 belum seluruhnya rampung. DED ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan lelang pekerjaan fisik, mulai dari instalasi pengolahan air limbah hingga jaringan pipa.

Zona 1 akan dibangun di Pluit, Jakarta Utara dengan kapasitas mencapai 1,98 juta meter kubik per hari. Investasi untuk pembangunan zona 1 Rp8,50 triliun dan pendanaannya berasal pinjaman dari Japan International Cooperation Agency.

"*Loan signing* memang ditargetkan akhir 2018 atau awal 2019 meskipun sampai sekarang belum dilakukan negosiasi *loan* ini," jelas Danis kepada *Bisnis*, Selasa (16/10).

Kementerian PUPR sebelumnya membahas proyek ini dengan JICA di Bali dalam rangkaian IMF-World Bank Annual Meeting.

Dua proyek lain yang akan didanai JICA juga dibahas. Rencananya, JICA akan mengucurkan pinjaman untuk proyek Jakarta Sewerage System sebesar US\$903,60 juta, terdiri atas US\$622 juta untuk zona 1 dan US\$281,60 juta untuk zona 6. Se-

bagian kecil desain dasar di Zona 6 telah selesai.

Dia menyebutkan bahwa Kementerian PUPR berencana menggelar lelang konsultan pada akhir 2018 atau awal 2019. "Ini untuk menyelesaikan desain yang belum selesai semua sekaligus membantu menyusun dokumen tender."

Di zona 6, fasilitas pengolahan air limbah akan dibangun di Duri Kosambi dengan kapasitas 282.000 meter kubik per hari. Zona 1 dan 6 adalah dua zona prioritas dari 15 zona pengolahan air limbah Jakarta.

Jakarta Sewerage System merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Proyek ini amat penting untuk meningkatkan cakupan wilayah pengolahan air limbah yang saat ini hanya 4% dengan tingkat pencemaran Biological Oxygen Demand 84 miligram per liter. Pencemaran terjadi karena air limbah yang berasal rumah tinggal langsung dibuang ke sungai.

Berdasarkan informasi dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, tingkat layanan sanitasi Jakarta menempati posisi kedua terendah dibandingkan dengan sembilan Ibu Kota negara di Asia Tenggara.

Pembangunan zona 1 dan 6 diproyeksi meningkatkan cakupan pelayanan air limbah Jakarta menjadi 20%. Bila 15 zona pengolahan air limbah rampung, cakupan pelayanan bisa mencapai 90%. Proyeksi ini diharapkan terwujud pada 2035. (*Rivki Maulana*)